

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Ketersediaan energi sebagai sumber daya alam menempati posisi penting dalam isu ekonomi politik internasional. Konsumsi energi dunia yang terus meningkat sejak tahun 1990-an dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2020<sup>1</sup> merupakan indikasi kuat pentingnya isu ini untuk didiskusikan di ranah ekonomi politik internasional. Di masa ketika energi dunia semakin langka, terutama minyak dan gas bumi (migas), negara-negara di seluruh dunia berupaya meningkatkan usahanya untuk mencari migas. Salah satu caranya dengan berinvestasi di industri migas.

Industri minyak dan gas bumi merupakan industri utama bagi Bolivia semenjak akhir abad ke-19 hingga saat ini. Bolivia menggantungkan harapan yang tinggi pada sektor energi sebagai sumber pendapatan utama yang dapat meningkatkan GDP Bolivia ke tingkat yang lebih baik. Sektor energi Bolivia tidak hanya sebatas persoalan ekonomi saja tetapi juga dijadikan sebagai instrumen sosial dan politik untuk negosiasi, mobilisasi dan partisipasi. Migas Bolivia juga memainkan peran geopolitik strategis di Amerika Latin karena Bolivia merupakan

---

<sup>1</sup>Pernyataan Kandeh Yumkella, Secretary General's Special Representative for Sustainable Energy for All, Vienna Energy Forum 2013. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report> pada 13 Desember 2013 pukul 20.45 WIB.

negara dengan kandungan migas kedua terbesar setelah Venezuela yaitu mencapai 48.7 triliun kubik (2007)<sup>2</sup>.

Kerjasama investasi di industri migas Bolivia mulai berkembang di masa pemerintahan Presiden Sanchez de Lozada yang memberlakukan kebijakan privatisasi pada tahun 1993. Saat itu Bolivia mengalami krisis finansial dan hiperinflasi sehingga pemerintah memutuskan mengeluarkan kebijakan privatisasi. Privatisasi ini memungkinkan terciptanya sistem *joint-venture* antara pemerintah dengan investor asing dengan membuat *Risk Service Contract*<sup>3</sup>. Negara akan memegang 51% saham yang ada, yang kemudian akan ditransfer ke dalam sektor dana pensiun Bolivia dan menyerahkan sisanya pada investor asing.

Kebijakan privatisasi telah menarik perusahaan-perusahaan multinasional seperti *International Oil Company* (IOC) dan *National Oil Company* (NOC) untuk berinvestasi di Bolivia. Ada empat perusahaan utama yang memiliki bagian cukup besar di sektor ini yaitu Petrobras (perusahaan migas negara asal Brazil), Repsol-YPF (perusahaan energi swasta milik Spanyol dan Argentina), Total (perusahaan migas milik negara Perancis) dan British Gas (perusahaan energi swasta berbasis di Inggris). Privatisasi sektor migas ini telah memberikan dampak ekonomi yang cukup bagus bagi Bolivia. Setelah sektor ini dipindahtangankan ke perusahaan multinasional, metode dan teknologi yang dimiliki perusahaan

---

<sup>2</sup> Christian Velasquez-Donaldson, *Analysis of the Hydrocarbon Sector in Bolivia: How are the gas and Oil Revenues Distributed?*, Development Research Working Paper, June 2007, 13.

<sup>3</sup>Raquel Gutierrez and Mokrani, *Bolivia Returns Hydrocarbons to the Public Sector: Nationalization without Expropriation?* Diakses dari <http://www.globalpolitician.com/default.asp?21898-bolivia> pada 16 September 2013 pukul 23.15 WIB.

multinasional telah memungkinkan dieksplorasinya lebih dalam kekayaan migas yang ada di Bolivia.

Pada umumnya perusahaan tersebut berinvestasi di sektor hulu seperti eksplorasi dan kegiatan pemboran. Melalui metode dan teknologi canggih yang dimiliki perusahaan telah memungkinkan dieksplorasinya lebih dalam lagi kekayaan migas yang ada di Bolivia. Tercatat pada Januari 2002, kandungan migas (*proven*) Bolivia berada pada angka 775 bcm (*bank cubic metre*) atau 15% lebih besar dari tahun 2001 dan tujuh kali lebih besar dari angka 106 bcm di tahun 1997<sup>4</sup>. Rata-rata perusahaan memproduksi 212 mcf (*million cubic feet*) per harinya<sup>5</sup>.

Namun pada perkembangannya isu migas telah menyebabkan stabilitas politik Bolivia terganggu, terbukti dengan terjadinya empat kali pergantian presiden hanya dalam kurun waktu tiga tahun, dari tahun 2003 hingga ketika turunnya Presiden Lozada di awal tahun 2006 dan terpilihnya Evo Morales sebagai presiden baru Bolivia<sup>6</sup>. Adanya perlawanan politik dan banyaknya demonstrasi massa menuntut dilakukannya nasionalisasi terus bergulir. Target ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terjadi pada masa Pemerintahan Lozada yang dianggap sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan ekonomi dan politik di Bolivia yang buruk.

---

<sup>4</sup>*International Energy Agency, World Energy Outlook, 2002 Edition*. Diakses dari [http://www.manicore.com/fichiers/world\\_energy\\_outlook\\_1998.pdf](http://www.manicore.com/fichiers/world_energy_outlook_1998.pdf) pada 15 September 2013 pukul 23.45 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid*, 352.

<sup>6</sup>Fernando H. Navajas, *Hydrocarbons Policy, Shocks and Collective Imagination: What Went Wrong in Bolivia?*, Conference on Populism and Natural Resources, November 1-2, 2007, 4.

Besarnya nilai dan arti energi bagi Bolivia telah mendorong dilakukannya upaya-upaya untuk mengamankan kepentingan terhadap sumber energi tersebut. Pengamanan kepentingan ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales. Kebijakan nasionalisasi pada dasarnya bukanlah konsep yang baru di kawasan Amerika Latin. Beberapa negara di kawasan ini sudah pernah menjalankan kebijakan nasionalisasi seperti Venezuela, Meksiko dan Chili.

Kebijakan nasionalisasi dengan cara pengambilalihan aset secara penuh tentu akan mudah memicu kemarahan komunitas bisnis internasional, bahkan bisa berujung pada penuntutan hukum ke badan arbitrase internasional. Untuk itu beberapa negara memilih kebijakan nasionalisasi dengan pengambilalihan secara perlahan-lahan (*creeping expropriation*)<sup>7</sup> dalam bentuk pengetatan regulasi, penyiasaan pajak, batas pengiriman kembali nilai tukar mata uang, pergantian di nilai tukar dan renegotiasi secara paksa. Negara-negara berkembang cenderung memilih opsi ini karena ketergantungan yang masih sangat tinggi terhadap investor asing dalam hal pendanaan dan teknologi.

Diberlakukannya kebijakan nasionalisasi<sup>8</sup> di Bolivia oleh Presiden Evo Morales 1 Mei 2006 pada awalnya hanya untuk menyelamatkan perekonomian

---

<sup>7</sup>Scot W Anderson, *Expropriation, Nationalization and Risk Management*, 18. Diakses dari [http://www.dgslaw.com/images/materials/AndersonScot\\_expropriation.pdf](http://www.dgslaw.com/images/materials/AndersonScot_expropriation.pdf) pada 7 Desember 2013 pukul 19.45 WIB.

<sup>8</sup>Secara garis besar nasionalisasi ala Evo Morales (berdasarkan *Supreme Decree 28701*) berupa pengambilalihan kepemilikan asing secara bertahap dalam bentuk renegotiasi kontrak hingga nasionalisasi secara paksa, dimana perusahaan minyak dan gas negara Bolivia, YPFB (*Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos*) akan mengambilalih keseluruhan rantai produksi hingga pemasaran dan peran investor asing akan dikurangi menjadi sebatas penyedia jasa bagi

dan memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Tercatat sebesar 63% masyarakat Bolivia hidup kurang dari US\$ 2 per hari<sup>9</sup>, kurangnya akses terhadap energi listrik dan kondisi kemiskinan dilihat dari *Human Development Index* (HDI) Bolivia tahun 2005 yang hanya 0.695 telah menempatkan negara ini di peringkat 117 dari 177 negara<sup>10</sup>. Pendapatan perkapita penduduk Bolivia pada tahun 1978 masih lebih besar daripada pendapatan perkapita penduduk Bolivia di tahun 2005<sup>11</sup>. Buruknya stabilitas politik dan tingginya tingkat korupsi ikut memperparah kondisi tersebut.

Munculnya Morales dengan kebijakan nasionalisasinya telah menyulut permasalahan baru antara pemerintah Bolivia dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah lama berinvestasi di sektor migas Bolivia. Secara hukum kebijakan nasionalisasi Bolivia dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap kontrak perjanjian yang telah dibuat dengan masing-masing perusahaan. Sebelumnya di tahun 2005 Bolivia juga telah mengubah perjanjian secara sepihak dengan mengeluarkan peraturan migas baru yang mengatur kenaikan tarif pajak dari 18% menjadi 50% bagi perusahaan multinasional<sup>12</sup>.

---

YPFB. Hak resmi atas aset tersebut masih tetap ada pada investor asing, tetapi hak investor untuk menggunakan aset tersebut berkurang sebagai akibat dari campur tangan negara.

<sup>9</sup>*Country Profile: Bolivia 2006*, Federal Research Division, 11. Diakses dari <http://memory.loc.gov/frd/cs/profiles/Bolivia.pdf> pada 11 September 2013 pukul 21.15 WIB

<sup>10</sup>2006 Human Development Report, United Nations Development Programme. Diakses dari <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006GlobalHDR/English/HDR2013%20Report%20English.pdf> pada 29 Desember 2013 pukul 20.32 WIB.

<sup>11</sup>Mark Weisbrot, *Bolivia's Economy: The First Year*, Center for Economic and Policy Research, January 2007, 20.

<sup>12</sup>Jeffery R. Webber, Thesis, *Left-Indigenous Struggle in Bolivia, 2000-2005*, University of Toronto, 2009, 179.

Sebanyak 20 perusahaan migas asing terkena imbas kebijakan nasionalisasi ini. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah Repsol-YPF (perusahaan energi swasta berbasis di Spanyol-Argentina), Petrobras (perusahaan migas milik negara Brazil), Total (perusahaan migas milik negara Perancis), ExxonMobil (perusahaan migas milik negara Amerika Serikat), British Gas (perusahaan energi swasta berbasis di Inggris) dan Royal Dutch Shell (perusahaan migas milik negara Belanda). Sebelum nasionalisasi perusahaan-perusahaan ini mengontrol hampir 70% dari produksi gas di Bolivia<sup>13</sup>. Perusahaan-perusahaan ini rata-rata menginvestasikan sebesar US\$ 200 juta di industri migas Bolivia<sup>14</sup>.

Perusahaan migas negara berbasis di Brazil, *Petroleo Brasileiro* (Petrobras) muncul sebagai pihak yang bereaksi paling keras terhadap kebijakan ini. Petrobras merupakan perusahaan terbesar di Bolivia dan berkontribusi sebesar 20% terhadap GDP Bolivia. Petrobras mengancam akan meninggalkan Bolivia dan mengajukan permasalahan ini ke badan arbitrase internasional. Petrobras juga telah menyatakan niatnya untuk membatalkan rencana investasi sebesar US\$ 2 milyar yang semula dialokasikan untuk mengembangkan industri migas Bolivia<sup>15</sup>. Begitupun dengan perusahaan British Gas dan Total yang mengancam akan keluar dari Bolivia dan mengajukan permasalahan ini ke badan arbitrase internasional.

---

<sup>13</sup>Sidney Weintraub, *Bolivia's Natural Gas Nationalization, Issues in International Political Economy*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, D.C, May 2006, Number 77, 10.

<sup>14</sup>Marco Antonio Urioste Viera, *Gas Politics and Economics in Bolivia: How Would It Affect the Development of the Potential Gas Market in Chile and Brazil?*, Center for Energy, Petroleum and Mineral Law Policy, 22.

<sup>15</sup>Norman Gall, *Gas in Bolivia: Conflicts and Contracts*, Fernand Braudel Institute of World Economics, 2007, 6.

Kebijakan nasionalisasi merupakan hasil pertimbangan ekonomi dan politik pemerintah yang berkuasa. Dalam 100 hari pertama semenjak Evo Morales menjabat sebagai presiden, ia melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di luar negeri diantaranya Kuba, Venezuela, Spanyol, Perancis, Cina, Afrika Selatan dan Brazil. Keberadaan Morales di beberapa negara ini dinilai sebagai bagian dari upaya Bolivia menjalin kerja sama bilateral yang lebih mendalam<sup>16</sup>. Kerja sama itu meliputi bidang pertanian, pertahanan, penerbangan, infrastruktur dan energi<sup>17</sup>.

Mengingat Bolivia masih sangat membutuhkan modal asing untuk keberlangsungan perekonomiannya terutama di industri migas, berbagai upaya dilakukan untuk mendatangkan investor baru ke Bolivia. Ketika kunjungan Morales ke Cina misalnya, Morales mendesak Presiden Hu Jintao untuk datang dan berinvestasi di industri migas Bolivia<sup>18</sup>. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam fenomena tersebut. Bolivia yang pada saat itu mengalami permasalahan ekonomi dan politik berani mengambil keputusan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Di sini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh kerja sama investasi energi di Bolivia pasca Evo Morales mengeluarkan kebijakan nasionalisasi. Apakah Bolivia akan ditinggalkan investor meskipun migas sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara.

---

<sup>16</sup>*Bolivia's Morales Travels to Cina*, Diakses dari <http://www.nytimes.com/2007/01/09/world/americas/09bolivia.html?fta=y&r=0> pada 4 Januari 2014 pukul 22.47 WIB.

<sup>17</sup>*Bilateral Relations with Bolivia After Nationalization*, diakses dari <http://www.bnamericas.com/news/infrastructure/bilateral-relations-with-bolivia-after-nationalization1> pada 5 Januari 2014 pukul 22.10 WIB.

<sup>18</sup>Francois Lafargue, *Cina Presence in Latin America*, French Centre for Research on Contemporary Cina, November-December 2006, Vol.68, 6.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan nasionalisasi migas Bolivia adalah kebijakan nasionalisasi tanpa pengambilalihan secara penuh yaitu dengan renegotiasi kontrak dan pengambilan secara paksa. Kebijakan ini diambil guna menghindari tuntutan hukum (melalui badan arbitrase internasional) dan didasarkan pada pertimbangan ekonomis. Sebagai negara berkembang, Bolivia cenderung masih sangat membutuhkan keberadaan investor-investor asing dalam hal pendanaan dan alih teknologi. Sebelum nasionalisasi, investasi terhadap sektor hulu migas memberikan keuntungan US\$ 40 juta hingga US\$ 70 juta pertahunnya bagi Bolivia. Investasi ini juga telah meningkatkan estimasi kandungan gas alam (*probable* dan *possible*) yaitu 706 bcm dan 704 bcm. Rata-rata perusahaan asing memproduksi migas sebesar 212 mcf perharinya. Di sisi lain, terdapat penolakan dari para investor asing terhadap nasionalisasi dan mengancam akan membawa kasus ini ke badan hukum internasional. Investor memerlukan adanya kepastian hukum demi ketenangan dalam berinvestasi, jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi secara penuh di masa depan, tidak adanya tindakan diskriminatif terhadap investor dan resiko politik ekonomi menjadi hal yang paling ditakutkan oleh para investor asing. Oleh karena itu secara garis besar pertanyaan permasalahan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah *Bagaimanakah bentuk pengaruh kebijakan nasionalisasi Evo Morales pada industri migas terhadap kerjasama investasi energi di sektor hulu Bolivia?*

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis ajukan adalah: *Bagaimana bentuk pengaruh kebijakan nasionalisasi Evo Morales pada industri migas terhadap kerja sama investasi energi di sektor hulu Bolivia?*

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bentuk kegiatan usaha dan investasi di sektor hulu migas Bolivia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi diterapkannya kebijakan nasionalisasi di Bolivia.
3. Menjelaskan pengaruh kebijakan nasionalisasi Evo Morales pada industri migas terhadap kerjasama investasi energi di sektor hulu Bolivia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam kajian ekonomi politik internasional yang dihadapkan dengan isu kebijakan nasionalisasi migas
2. Menambah wawasan tentang pengaruh dikeluarkan kebijakan nasionalisasi migas terhadap kerja sama investasi energi migas di Bolivia

3. Dapat menjadi model bagi Pemerintah Indonesia sebagai negara pemilik sumber energi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara tepat mengenai investasi asing

## 1.6 Studi Pustaka

Kebijakan nasionalisasi industri minyak dan gas bumi Bolivia yang terjadi pada tahun 2006 pada perkembangannya menjadi isu hangat dan mengundang perhatian dunia khususnya bagi pengamat kawasan Amerika Latin. Secara garis besar, tulisan-tulisan yang membahas mengenai nasionalisasi terdiri dari nasionalisasi sebagai isu ekonomi dan nasionalisasi sebagai isu politik domestik di suatu negara.

Nasionalisasi dari sudut pandang ekonomi cenderung difokuskan pada masalah investasi dan perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Lykke E. Andersen, Johann Caro, Robert Faris, dan Mauricio Medinaceli dalam *Natural Gas and Inequality in Bolivia after Nationalization* menjelaskan dampak kondisi ekonomi domestik Bolivia setelah nasionalisasi melalui perspektif makroekonomi<sup>19</sup>. Berdasarkan perspektif makroekonomi, kebijakan nasionalisasi merupakan suatu keberuntungan bagi Bolivia karena menambah 1% poin bagi pertumbuhan GDP. Namun ini juga dapat menyebabkan meningkatnya

---

<sup>19</sup> Lykke E. Andersen, Johann Caro, Robert Faris, dan Mauricio Medinaceli, "*Natural Gas and Inequality in Bolivia after Nationalization*", 2006, Institute for Advanced Development Studies, diakses dari [http://www.inesad.edu.bo/pdf/wp05\\_2006.pdf](http://www.inesad.edu.bo/pdf/wp05_2006.pdf) pada 18 September 2013 pukul 22.05 WIB.

kemiskinan dan ketidakadilan terutama bagi masyarakat miskin jika dibandingkan dengan situasi sebelum nasionalisasi.

Nasionalisasi menurut Andersen, memang baik jika dilihat dari sudut pandang pemerintah karena pemerintah dinilai telah mampu mengurangi utang luar negeri melalui peningkatan GDP negara yang terus meningkat sejak nasionalisasi diberlakukan. Namun disisi lain adanya nasionalisasi telah menyebabkan harga minyak naik di pasaran dunia dan ini akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat Bolivia sendiri, terutama masyarakat miskin karena tidak sanggup membeli minyak hasil olahan dengan harga tinggi<sup>20</sup>. Selain itu nasionalisasi yang diterapkan dinilai telah membuat iklim investasi di Bolivia memburuk, banyak investor asing yang berpikir ulang untuk berinvestasi di Bolivia karena kebijakan nasionalisasi yang dianggap akan merugikan para investor. Dalam jangka panjang tentu ini akan berdampak buruk bagi perekonomian Bolivia yang hanya mengandalkan kekuatan nasional saja.

Pandangan lain datang dari Mark Weisbrot, Rebecca Ray dan Jake Johnston (2009) dalam tulisan yang berjudul *Bolivia: The Economy During Morales Administration*<sup>21</sup>. Disini dijelaskan bahwa ada dampak positif dan negatif dengan diterapkannya kebijakan nasionalisasi bagi Bolivia khususnya di bidang ekonomi. Di satu sisi, Bolivia telah berhasil mencapai surplus pendapatan yang besar untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi Bolivia. Pertumbuhan

---

<sup>20</sup>Ibid, 54.

<sup>21</sup>Mark Weisbrot, Rebecca Ray dan Jake Johnston, *Bolivia: The Economy During the Morales Administration*, dalam *Center for Economic and Policy Research*, Desember 2009. Diakses dari <http://www.cepr.net/documents/publications/bolivia-2009-12.pdf> pada 18 September 2013 pukul 23.11 WIB.

ekonomi Bolivia dalam empat tahun terakhir telah lebih tinggi daripada masa 30 tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Bolivia meningkat menjadi 5.2 persen per tahun dan mencapai puncaknya pada 6.1 persen tahun 2008<sup>22</sup>. Ini disebabkan karena Bolivia menerapkan kebijakan perluasan fiskal untuk membendung guncangan ekonomi termasuk resesi dunia. Pemerintah Bolivia juga telah mengalokasikan dana yang cukup besar pada program-program sosial seperti kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun di sisi lain munculnya gerakan separatis dan pemimpin oposisi yang tidak mengakui pemerintahan Morales pada awal masa kepemimpinannya sempat menimbulkan guncangan dan ketidakstabilan investasi asing di Bolivia. *Foreign Direct Investment* (FDI) Bolivia sebelumnya juga sudah cukup terpuruk dari angka diatas US\$ 1 milyar pada tahun 1998 menjadi US\$ 240 juta pada tahun 2005<sup>23</sup>. Ditambah dengan adanya kebijakan nasionalisasi industri migas dan kebijakan baru di bidang ekonomi turut memperburuk situasi ini. Namun menurut Weisbrot masalah ini tidak akan memberikan dampak yang cukup parah bagi perekonomian Bolivia di masa mendatang jika diiringi dengan kemampuan pemerintah mengontrol dengan baik kekayaan alamnya.

Zimbabwe juga pernah melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan multinasional di tahun 2000. John Mutenyo dan Brandon Routman dalam tulisan *Nationalization of the Zimbabwe Mining Sector: Another Blunder by the Mugabe Regime?* memaparkan dampak nasionalisasi sektor pertambangan

---

<sup>22</sup> Ibid, 25.

<sup>23</sup> Ibid, 30.

dan perkebunan di Zimbabwe terhadap FDI<sup>24</sup>. Saat itu Presiden Mugabe melakukan nasionalisasi dengan mengambilalih penuh industri pertambangan dan perkebunan dan menyerahkan pada pengusaha-pengusaha lokal untuk mengelolanya. Mugabe menjalankan kebijakan nasionalisasi dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian rakyatnya.

Keputusan melakukan nasionalisasi pada perkembangannya justru membuat kondisi perekonomian Zimbabwe memburuk. Pertumbuhan produksi pertanian jatuh dari 3% menjadi -3% hanya dalam jangka waktu tiga tahun (1998-2000), arus net FDI menurun dari US\$ 435 juta pada tahun 1998 menjadi US\$ 0 pada tahun 2001, dan ekspor turun dari US\$ 2.1 milyar menjadi US\$ 1.3 milyar dalam kurun waktu yang sama. Antara tahun 2000 hingga 2009, pertumbuhan real GDP dan GDP per kapita sekitar -6%, tingkat pertumbuhan FDI hanya sekitar US\$ 35 juta per tahunnya.

Menurut Munteyo ini terjadi karena pengusaha-pengusaha lokal Zimbabwe belum siap dalam mengelola industri-industri yang dinasionalisasi pemerintah. Selain itu nasionalisasi telah menyebabkan investor asing di sektor lain meninggalkan Zimbabwe karena khawatir mereka akan menjadi target nasionalisasi selanjutnya. Akibatnya terjadi *capital outflow*, banyaknya pengangguran dan hanya sedikit investor baru yang berani berinvestasi di

---

<sup>24</sup> John Mutenyo and Brandon Routman, *Nationalization of the Zimbabwe Mining Sector: Another Blunder by the Mugabe Regime?*, March, 2011, 58. Diakses dari <http://www.miasa.org.za/Documents/Nationalisation%20position%20on%20state%20participation%20in%20mining%202012.pdf> pada 15 Januari 2014 pukul 22.20 WIB.

Zimbabwe. Selain itu Bolivia juga mengalami hiperinflasi dan ditambah dengan korupsi yang dilakukan Mugabe menyebabkan kondisi makin memburuk.

Negara lain yang juga menerapkan kebijakan nasionalisasi yaitu Venezuela. Mark Weisbrot dan Luis Sandoval dalam tulisan *The Venezuelan Economy in the Chavez Years* menjelaskan bahwa pada tahun 2006 Presiden Hugo Chavez melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan minyak internasional yang ada di Venezuela<sup>25</sup>. Perusahaan-perusahaan yang ikut dampak nasionalisasi antara lain perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat seperti ExxonMobil, Amoco Oil, Chevron, Conoco, Texaco dan Phillips Petroleum; perusahaan Perancis (Total); perusahaan Inggris (British Gas) dan perusahaan Norwegia (Statoil).

Kebijakan energi Chavez adalah kebijakan *mixed companies* yang didalamnya terdapat dua jenis saham. Kelas A akan dipegang oleh perusahaan negara 100% sebagai pemegang saham utama, sementara saham Kelas B akan dipegang oleh kontraktor sebelumnya sebagai pemegang saham minoritas. *Mixed Companies* ala Venezuela ini dapat dikategorikan sebagai *expropriation*, karena tidak ada kompensasi bagi perusahaan multinasional yang ingin meninggalkan sistem eksplorasi minyak Venezuela.

Perusahaan minyak internasional terbesar di Venezuela seperti Repsol YPF, Cina National Petroleum Corporation, Harvest Vinncler, Hocol, Vinncler Oil & Gas, Inemaka, Suelopetrol dan Open pada akhirnya menandatangani

---

<sup>25</sup> Mark Weisbrot and Luis Sandoval, *The Venezuelan Economy in the Chavez Years*, Center for Economic and Policy Research, July 2007, 20. Diakses dari [http://www.cepr.net/documents/publications/venezuela\\_2007\\_07.pdf](http://www.cepr.net/documents/publications/venezuela_2007_07.pdf) pada 17 Januari 2014 pukul 20.29 WIB.

perjanjian baru tersebut yang berlaku hingga tahun 2026. Hal ini membuka kesempatan bagi para perusahaan tersebut untuk ikut dalam operasi minyak dengan teknologi di kawasan Faja del Orinoco, Venezuela yang memiliki kandungan minyak non-konvensional jauh lebih besar daripada Arab Saudi. Investor tetap melanjutkan kerja samanya karena memperoleh kepastian hukum dan peluang mengeksplorasi minyak yang lebih besar di Venezuela.

Dari sisi hubungan internasional, menurut Jorge G. Castañeda dalam tulisan *Latin America's Left Turn* menyatakan bahwa tindakan Chavez dinilai sebagai upaya untuk mengamankan posisi Venezuela di kawasan Amerika Latin<sup>26</sup>. Venezuela telah berusaha untuk menggunakan kekayaannya minyaknya untuk membeli pengaruh di kawasan Amerika Latin dengan membayar hutang internasional para tetangganya yang kesulitan ekonomi seperti Argentina dan Ekuador, masing-masing sebesar US\$ 2.8 milyar dan US\$ 25 juta, dan memperbaharui kebijakannya dengan memberikan minyak bersubsidi ke negara-negara Karibia dan Amerika Tengah. Chavez ingin meningkatkan citra internasionalnya sebagai seorang sosialis dan secara perlahan mulai mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat sebagai tujuan utama ekspor migasnya.

Indonesia juga pernah melakukan nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan Belanda dan Inggris yang berada di Indonesia tahun 1958. Richard Robison menjelaskan dalam tulisan *Indonesia: the Rise of Capital* bahwa

---

<sup>26</sup>Jorge G. Castañeda, *Latin America's Left Turn*, Foreign Affairs, May/June 2006 Vol. 85 No.3, 40. Diakses dari <http://sandovalhernandezj.people.cofc.edu/r21.pdf> pada 20 Januari 2014 pukul 19.50 WIB.

nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan suatu ironi<sup>27</sup>. Kebijakan nasionalisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Indonesia hanyalah pembalasan atas kebijakan politik Belanda mengenai Irian Barat dan kebijakan Inggris dalam pembentukan Federasi Malaysia.

Penentuan perusahaan-perusahaan Belanda yang akan dinasionalisasi nampak dilakukan tergesa-gesa, sehingga kurang cermat. Perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda yang menguasai hajat hidup orang banyak belum dinasionalisasi secara keseluruhan. Robison menilai bahwa tindakan nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia sebenarnya bukanlah dengan tujuan untuk menyapakan modal asing melainkan mengubah bentuk kebijakan menjadi lebih ramah dan tidak membahayakan perekonomian nasional. Kebijakan itu berupa penetapan kontrak bagi hasil dalam industri migas maupun berupa pinjaman antar pemerintah.

Tindakan nasionalisasi juga telah membawa Indonesia ke badan arbitrase internasional dalam kasus tembakau menghadapi tuntutan perusahaan NV Verenigde Deli Maatschappijen dan NV Senembah Maatschappij. Penggugat tidak mengakui keabsahan nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No 86 tahun 1958 dengan alasan bahwa nasionalisasi bertentangan dengan azas-azas hukum perjanjian internasional.

Dari pembahasan literatur-literatur tersebut terlihat bahwa dampak kebijakan nasionalisasi lebih banyak dilihat di aspek ekonomi dan politiknya.

---

<sup>27</sup>Richard Robison, *Indonesia: the Rise of Capital*, Allen & Unwin, (Sydney, 1986), 17. Diakses dari [http://www.iias.nl/nl/40/IIAS\\_NL40\\_13.pdf](http://www.iias.nl/nl/40/IIAS_NL40_13.pdf) pada 12 Januari 2014 pukul 20.06 WIB.

Pembahasan mengenai nasionalisasi dan kerja sama investasi energi berupa *Foreign Direct investment* di beberapa negara menjadi masukan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu penelitian-penelitian mengenai pengaruh kebijakan nasionalisasi terhadap kerja sama investasi energi di Bolivia masih sedikit yang membahasnya, kebanyakan hanya membahas pengaruh terhadap kondisi ekonomi domestik Bolivia saja tanpa mempertimbangkan kelanjutan bentuk kerja sama yang terjadi di bidang energi Bolivia. Inilah yang membedakan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam mencermati kasus ini adalah dengan menggunakan konsep *Foreign Direct Investment*, bentuk kerja sama investasi energi dan konsep nasionalisasi.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan beberapa konsep untuk membangun suatu kerangka pemikiran guna mencapai kesatuan dalam memahami persepsi dan alur pembahasan yang akan penulis sajikan. Secara garis besar, terdapat tiga konsep utama yang penting dipahami, yaitu:

### **1.7.1 *Foreign Direct Investment***

Keputusan investasi ke luar negeri merupakan hasil dari proses yang kompleks yang berbeda dari investasi di dalam negeri. Investasi di luar negeri biasanya didasari oleh pertimbangan strategis, pertimbangan perilaku dan pertimbangan ekonomis yang kompleks. Menurut Paul Krugman yang dimaksud

dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain<sup>28</sup>. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) merupakan transfer sumber daya finansial suatu perusahaan dalam bentuk perusahaan multinasional. Transfer ini melintasi batas negara di mana perusahaan yang melakukan investasi membeli kekuasaan untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan asing. FDI biasanya juga disertai dengan transfer masukan faktor lain dalam bentuk pengetahuan dan ide. Dalam hal-hal tertentu perusahaan multinasional lebih dianggap sebagai sarana dalam hal transfer pengetahuan dan teknologi dibanding sebagai penyedia dana. Dengan kata lain, FDI merupakan suatu paket yang terdiri dari modal, teknologi dan keterampilan yang dapat mempunyai *spill-over effect* atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Menurut lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus masalah investasi, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD)<sup>29</sup>, FDI adalah kegiatan investasi lintas negara yang memiliki ciri *beyond exporting, licencing & franchising*, dan *active involvement in the management*. FDI merupakan instrumen investasi lintas negara yang memberikan pengaruh riil terhadap perekonomian suatu negara.

---

<sup>28</sup>Paul R. Krugman & Edward Graham, *The Surge in Foreign Direct Investment in the 1980s*, dalam tulisan Kenneth A. Froot, *The Introduction to Foreign Direct Investment*, University of Chicago, 33.

<sup>29</sup>*Foreign Direct Investment: Definition and Sources*, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 245.

FDI dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan arah aliran modal, target dan motif<sup>30</sup>. Berdasarkan arah aliran modal, terdapat dua tipe FDI yaitu *inward* FDI dan *outward* FDI. *Inward* FDI adalah modal asing yang diinvestasikan kepada kegiatan ekonomi domestik. *Inward* FDI dapat didorong oleh adanya penghapusan pajak, subsidi, pinjaman lunak dan penghapusan berbagai hambatan lainnya. Kemudahan tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa keuntungan jangka panjang masuknya FDI memiliki nilai dan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pengurangan pendapatan negara dalam jangka pendek karena memberikan fasilitas tersebut. Di lain FDI jenis ini dapat dihambat melalui pembatasan kepemilikan saham dan persyaratan yang berbeda antara investasi asing dan investasi domestik.

*Outward* FDI (OFDI) merupakan modal domestik yang diinvestasikan di luar negeri. Investasi ini dapat dilakukan dalam rangka ekspor-impor komoditas negara asing. Investasi ini dapat didorong melalui jaminan pemerintah (*government-based insurance*) atas resiko yang timbul. Sebaliknya, investasi ini dapat dihambat melalui disinsentif pajak pada perusahaan yang melakukan investasi di luar negeri atau berbagai ketentuan mengenai keuntungan yang disubsidi kepada perusahaan lokal.

Berdasarkan targetnya, FDI dapat diklasifikasikan sebagai *Greenfield investment, mergers* dan *acquisitions* (M&A)<sup>31</sup>. *Greenfield Investment* merupakan

---

<sup>30</sup>Imad A. Moosa, *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*, 6. Diakses dari [http://www.petrigashi.000space.com/Fakulteti%20Filologjik%20UP/Master/Mbi%20Investimet%20e%20Jashtme%20Direkte/FDI\\_Theory%20evidence%20and%20practice\\_kapituj%20te%20zgjedhur.pdf](http://www.petrigashi.000space.com/Fakulteti%20Filologjik%20UP/Master/Mbi%20Investimet%20e%20Jashtme%20Direkte/FDI_Theory%20evidence%20and%20practice_kapituj%20te%20zgjedhur.pdf) pada 27 Desember 2013 pukul 07.28 WIB.

<sup>31</sup> *Ibid*, 173.

FDI untuk melakukan tambahan kegiatan bisnis yang sudah berjalan. Investasi jenis ini merupakan target utama dari negara penerima FDI (*host country*) karena investasi ini dapat menciptakan kapasitas produksi baru dan lapangan kerja, transfer teknologi dan membuka hubungan dengan pasar global. Kritikan terhadap investasi ini adalah dapat mengakibatkan penurunan pangsa pasar internasional dari perusahaan domestik. Selain itu, keuntungan dari *greenfield investment* cenderung akan ditranfer ke negara asal (*home country*) dan tidak ditanamkan kembali di perekonomian negara penerima FDI.

*Merger and Acquisition* (M&A) adalah FDI yang menyebabkan perpindahan kepemilikan aset dari perusahaan domestik kepada perusahaan asing. *Cros-border mergers* terjadi apabila aset dan operasional perusahaan dari beberapa negara disatukan dan membentuk perusahaan baru. *Cross-border acquisitions* terjadi apabila aset dan operasional perusahaan domestik beralih kepada perusahaan asing dan perusahaan domestik tersebut menjadi afiliasi dari perusahaan asing tersebut.

Arus *inward* dan *outward* FDI juga dapat diklasifikasikan berdasarkan motif atau alasan melakukan investasi, yaitu: *resource-seeking*, *market-seeking*, *efficiency seeking*, dan *strategic asset-seeking*<sup>32</sup>. *Resource-seeking* yaitu investasi yang dilakukan untuk memperoleh faktor produksi berupa sumber daya alam dan tenaga kerja murah yang lebih efisien di luar negeri dibandingkan bila dilakukan di dalam negeri. Investasi ini banyak terjadi di negara berkembang dalam rangka memperoleh harga bahan baku dan biaya tenaga kerja lebih murah dibandingkan

---

<sup>32</sup> Ibid,177.

dengan menggunakan faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal. *Market seeking* yaitu investasi dalam rangka membuka pasar baru atau menjaga pasar yang telah ada. FDI dijalankan karena pertimbangan pasar, untuk menembus pasar negara domestik dan umumnya dihubungkan dengan pendapatan per kapita, pertumbuhan pasar, akses ke pasar global dan regional. Investasi ini direalisasikan dalam bentuk merger dan akuisisi. *Efficiency-seeking* yaitu investasi yang dilakukan setelah terjadinya investasi yang bermotif *resource-seeking* atau *market seeking*, didorong keinginan untuk meningkatkan keuntungan melalui peningkatan skala ekonomi. FDI ini mengacu pada proses produksi dilihat dari kondisi geografis dan mengalokasikan bagian tertentu di negara-negara yang menawarkan keuntungan finansial. *Strategic asset-seeking* merupakan investasi taktis untuk mencegah penguasaan atas sumber alam oleh perusahaan pesaing. Jumlah FDI baik *inward* maupun *outward* diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu *flows* atau aliran dana, dan *stock* yaitu nilai akumulatif dari modal, laba dan simpanan.

Masuknya FDI ke suatu negara memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akibat langsung yang terjadi misalnya peningkatan permintaan tenaga kerja, peningkatan pembentukan modal, penggunaan peralatan dan teknologi yang lebih canggih dan terciptanya kompetisi yang mengarah pada produktifitas perekonomian<sup>33</sup>. Menurut Robert E. Lucas dalam tulisan *On the Mechanics of Economic Development* mengembangkan teori-teori pertumbuhan ekonomi baru yang dapat

---

<sup>33</sup> Holger Gorg dan David Greenaway, *Foreign Direct Investment and Intra-Industry Spillovers: A Review of Literature*, Research Paper 2001/37, Leverhulme Centre for Research and Globalisation and Economic Policy, 14.

menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang, salah satunya dengan adanya perubahan teknologi yang lebih canggih<sup>34</sup>.

Menurut Lucas pertumbuhan ekonomi suatu negara direpresentasikan oleh akumulasi modal manusia (*human capital accumulation*) dan akumulasi pengetahuan serta teknologi melalui proses produksi (modal setiap perusahaan meliputi teknologi yang akan menciptakan *spillover* teknologi ke perusahaan-perusahaan lainnya). Peningkatan GDP per kapita dianggap merupakan fenomena sementara saja, yang bersumber dari perubahan teknologi atau proses penyeimbangan jangka pendek selama perekonomian mendekati keseimbangan jangka panjangnya.

Oleh karena itu menjadi penting bagi suatu negara dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara:

1. Mendorong kegiatan investasi di bidang riset dan pengembangan (R&D) daripada mengalokasikan investasi pada akumulasi modal-modal fisik.
2. Jika hal diatas tidak mungkin dilakukan, paling tidak langkah yang dapat ditempuh adalah memberikan subsidi pada proses akumulasi total sumber daya manusia dan teknologi karena FDI pada umumnya menggunakan sumber tenaga kerja lokal.

---

<sup>34</sup>Robert E. Lucas, *On the Mechanics of Economics Development*, 32. Diakses dari <http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillonthibault/lucasmehanicseconomicgrowth.pdf> pada 4Maret 2014 pukul 22.50 WIB.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas akan memiliki implikasi-implikasi penting yakni:

1. Keterbukaan ekonomi negara terhadap perekonomian dunia melalui kegiatan perdagangan dan lain-lain yang akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan teknologi.
2. Negara-negara yang kurang berkembang dan memiliki jumlah penduduk besar akan tetap bisa mendapatkan manfaat dari integrasi ekonomi dunia.

### 1.7.2 Kerja Sama Investasi Energi

Pengusahaan (hulu) migas sebagian besar dilakukan oleh perusahaan multinasional di banyak negara berkembang berdasarkan suatu kontrak. Dalam perjanjian tersebut pemerintah dan kontraktor mempunyai misi (prioritas) berbeda yang menurut Richard Seba dalam bukunya *Economics of Worldwide Petroleum Production* adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

Tabel 1.1. Perbedaan Prioritas Perjanjian antara Pemerintah dan Kontraktor

No	Pemerintah	Kontraktor
1	Kontraktor jangan mencampuri urusan politik pemerintah	Memaksimalkan dan mempercepat pengembalian investasi
2	Mendapatkan mata uang asing dan memperkuat modal keuangan negara	Mendapatkan pengembalian yang wajar atas resiko yang diambil
3	Memaksimalkan pendapatan dan membangun industri lokal dengan bahan bakar yang relatif murah	Meminimumkan periode dimana investasinya beresiko ( <i>periode pay back</i> )
4	Memajukan masyarakat setempat	Menjamin pemulangan kembali dana dan hak atas ekspor migas
5	Memelihara dan meningkatkan pengawasan atas SDA milik negara	Menjaga kepemilikan proyek dan haknya atas keuntungannya

<sup>35</sup> Richard Seba, *Economics of Worldwide Petroleum Production*, 8. Diakses dari [http://trc.jogmec.go.jp/pdf/topics01\\_20060331b-1.pdf](http://trc.jogmec.go.jp/pdf/topics01_20060331b-1.pdf) pada 4 Maret 2014 pukul 23.30 WIB.

6	Mengurangi impor serta meningkatkan ekspor dan efisiensi	Menjaga kontrol operasi untuk menjamin produksi
7	Mempromosikan kepemilikan lokal	Mencegah membuat masalah dalam kontrak di negara lain
8	Mengembangkan industri lokal untuk memproduksi peralatan lapangan migas	Menjaga standar global, efisiensi dan reputasi
9	Mendorong beasiswa pendidikan memaksimalkan transfer dan R&D teknologi	Mengembangkan manager-manager di luar negeri
10	Mengembangkan kemampuan nasional industri migas	Menyeimbangkan pemasokan migas dunia dengan peningkatan cadangannya

Menurut Denis Babusiaux dalam *Oil and Gas Exploration and Production Reserves, Costs, Contracts* pada dasarnya kontrak-kontrak migas di dunia terbagi atas:<sup>36</sup>

1. Koneksi (*Concession*); negara menjamin kontraktor hak eksplorasi eksklusif dan hak pengembangan dan produksi eksklusif untuk setiap penemuan komersial. Kontraktor berhak atas migas yang diproduksi dengan kewajiban membayar royalty dalam bentuk uang atau migas itu sendiri.
2. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*); kontrak kerja sama antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sektor migas dengan prinsip bagi hasil. Negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan operasional dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor sebagai operator dan menjalankan

---

<sup>36</sup> Denis Babusiaux, *Oil and Gas Exploration and Production Reserves, Costs, Contracts*, Center for Economic and Management (IFP-School), 2007, 49.

operasi di bawah pengawasan negara. Kontraktor bertanggung jawab atas pembiayaan dan menjalankan operasi dan hanya memperoleh pengembalian biaya dan keuntungan jika terdapat penemuan komersial yang dikembangkan. Besarnya pengembalian biaya operasi ini tidak harus selalu harus penggantian penuh (*full recovery*). Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara. Besarnya pembagian hasil produksi ini berbeda-beda tergantung berbagai faktor. Kepemilikan asset ada pada negara (perusahaan negara).

3. Risk Service Contracts; kontrak dimana kontraktor melakukan eksplorasi migas dengan resiko dan pengeluaran sendiri atas nama perusahaan nasional dan mendapat pengembalian biaya yang dikeluarkan dan diremunerasi dalam bentuk tunai, tergantung kepada keberhasilan eksplorasinya. Semua produksi adalah milik perusahaan nasional, walaupun kontraktor mungkin dapat membeli sebagian dari produksi tersebut atas kondisi-kondisi yang disetujui. Perbedaan kontrak ini dengan PSC adalah kontraktor dibayar tunai dan bukan dengan produksi migas, sehingga dia tidak dapat memasarkannya.
4. Buyback Contracts; kontraktor mengeluarkan semua biaya modal, mendapatkan biaya selama produksi dan memperoleh pembayaran tetap yang dinegosiasikan sebelum kontrak ditandatangani yang tidak

tergantung kepada fluktuasi harga. Kontrak ini biasanya dibatasi dalam periode 4-6 tahun.

### 1.7.3 Nasionalisasi

Secara umum konsep nasionalisasi didefinisikan sebagai pentransferan sumber-sumber privat ke publik<sup>37</sup>. Pentransferan ini diterjemahkan pada konteks pengambilalihan kepemilikan (*ownership*) dan/atau kontrol terhadap aset-aset, perusahaan, infrastruktur maupun tanah milik swasta ke tangan pemerintah. Pengambilalihan ini bersifat *compulsory* (wajib atau diwajibkan), baik melalui ekspropriasi (pengambilalihan secara penuh demi kepentingan umum atau kepentingan ekonomi tertentu) maupun secara konfiskasi (pengambilalihan hak milik yang dilakukan penguasa demi kepentingan pribadi).

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pengambilalihan hak milik asing oleh negara merupakan salah satu resiko utama dalam investasi asing. Dalam salah satu dokumen resmi UNCTAD menyatakan bahwa “*The issue of taking of foreign property is central to the risk perceptions in foreign investment. Hence, the issue has relevance to a wide variety of other issues and concepts in the area of foreign investment*”<sup>38</sup>.

Pada perkembangannya dalam dunia internasional, nasionalisasi tidak saja merupakan hasil dari pertimbangan ekonomi namun juga politik dari pemerintah

---

<sup>37</sup>*Nationalization*. Diakses dari <http://www.economicexpert.com/a/nationalization.html> pada 29 November 2013 pukul 19.00 WIB.

<sup>38</sup>United Nations Conference on Trade and Development, *Taking of Property, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements*, UNCTAD/ITE/IIT/15, United Nations, New York and Geneva, 2000, 35.

yang berkuasa. Sebagai salah satu resiko terbesar dalam investasi di bidang energi, terutama minyak dan gas bumi, perusahaan-perusahaan minyak internasional sangat berhati-hati dalam berinvestasi di suatu negara. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk melindungi diri dari perubahan sepihak kebijakan atau regulasi yang telah dibuat dalam perjanjian sebelumnya.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dilakukannya nasionalisasi yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Penyelamatan, yaitu ketika suatu perusahaan swasta ditransfer menjadi sebuah sektor publik untuk mengamankan lapangan pekerjaan ke fasilitas produksi yang penting bagi pertahanan negara.
- 2) *Expediency*, yaitu aksi yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa ataupun kelompok politik.
- 3) *Self determination*, dengan membeli kembali aset kekayaan bangsa sebagai bentuk simbolis dari dekolonialisasi dan kemerdekaan nasional.
- 4) *Cost expropriation*, dari aset-aset (atau pembelian harga barang-barang yang sangat jatuh) yang secara normal tidak akan mampu dibeli oleh Pemerintah.
- 5) Rasionalisasi, pendorongan efisiensi dalam industri melalui pengambilalihan dari perusahaan besar untuk perusahaan kecil yang membutuhkan investasi besar.

---

<sup>39</sup>Roberto Chang, Constantino Hevia, Norman Loayza, *Privatization and Nationalization Cycles*, July 2009. Diakses dari [http://econweb.rutgers.edu/rchang/PNJJul\\_20\\_09.pdf](http://econweb.rutgers.edu/rchang/PNJJul_20_09.pdf) pada 30 Desember 2013 pukul 20.05 WIB.

- 6) Fitur-fitur radian, menambah kontrol dari industri maupun sektor-sektor utama sebagai transisi ke ekonomi sosialis tanpa kemiskinan, pergolakan dan hirarki.
- 7) Inkapasitas, nasionalisasi karena lebih mudah daripada regulasi pasar, industri dan juga hubungan industrial yang efektif.
- 8) Hedonik, pengambilalihan aset dengan alasan akan menambah perhatian media global, ataupun karena ingin memberikan kerugian tersendiri bagi negara musuh.

Menurut Jones Luong, aksi nasionalisasi dan privatisasi terutama di bidang energi merupakan hasil dari pertimbangan politik dan ekonomi pemerintah yang berkuasa. Luong menyimpulkan bahwa dalam konteks kepemilikan dan kontrol terdapat empat model strategi yang paling utama yaitu:<sup>40</sup>

1. Kepemilikan negara (nasionalisasi) dengan keterlibatan asing yang rendah.

Negara memiliki hak untuk mengembangkan semua deposit energi dan mineral dan juga saham mayoritas dalam aktifitas produksi, pengolahan dan komersialisasi. Investor asing dapat berpartisipasi dalam pembentukan kontrak seperti *joint-ventures* yang membatasi kontrol manajerial dan operasional.

---

<sup>40</sup>Jones Luong, *Rethinking the Resource Curse: Ownership Structure and Institution Capacity*, a paper prepared for presentation at the conference on Globalization and self-determination, Yale University, May 14-15, 2004, 27. Diakses dari [http://www.annualreviews.org/\\_JonesLuong\\_103113FINAL.pdf](http://www.annualreviews.org/_JonesLuong_103113FINAL.pdf) 5 Oktober 2013 pukul 19.45 WIB.

2. Kepemilikan negara (nasionalisasi) dengan keterlibatan asing yang tinggi.

Negara memiliki hak untuk mengembangkan semua deposit energi dan mineral dan juga saham mayoritas dalam aktifitas produksi, pengolahan dan komersialisasi. Investor asing dapat berpartisipasi melalui kontrak permisif seperti *Production Sharing Agreements* (PSA) yang memberikan investor tersebut beberapa level kontrol terhadap aktifitas manajerial dan operasional.

3. Kepemilikan privat dengan keterlibatan asing yang rendah.

Perusahaan privat (domestik) memiliki hak mengembangkan semua deposit energi dan mineral dan mayoritas saham dalam fasilitas produksi, pengolahan dan komersialisasi. Investor asing dapat berpartisipasi melalui kontrak seperti *joint-venture* yang membatasi kontrol manajerial dan operasional.

4. Kepemilikan privat dengan keterlibatan asing yang tinggi.

Perusahaan privat (asing) memiliki hak untuk mengembangkan semua deposit energi dan mineral dan mayoritas saham dalam fasilitas produksi, pengolahan dan komersialisasi. Investor asing dapat membeli saham dalam fasilitas yang tersedia ataupun berpartisipasi dalam kontrak permisif seperti *Production Sharing Agreements* (PSA) yang memberikan investor tersebut beberapa level kontrol terhadap aktifitas manajerial dan operasional.

Tindakan nasionalisasi dan investasi asing merupakan dua hal yang bertolak-belakang. Di satu sisi para investor membutuhkan adanya kepastian hukum atas usaha yang dijalaninya, dan di sisi lain negara penerima investasi berdalih adanya kesenjangan ekonomi dan alasan politis lainnya untuk melakukan tindakan nasionalisasi. Persoalan nasionalisasi menjadi salah satu resiko terbesar bagi perusahaan multinasional, terutama di industri migas, dalam berinvestasi di luar negeri.

Sebelum dilakukannya nasionalisasi di Bolivia, jenis investasi yang masuk sebagian besar berupa *outward* FDI, dimana adanya aliran modal dari suatu perusahaan yang diinvestasikan di luar negeri (Bolivia). Saat pemerintahan Presiden Lozada dengan kebijakan privatisasinya, banyak perusahaan multinasional yang tertarik untuk berinvestasi di Bolivia terutama di industri migas dengan membuat perjanjian kerja sama *risk service contract*. Ketika nasionalisasi diberlakukan, Morales melakukan perubahan kontrak kerja sama dimana YPFB yang semula hanya berperan sebagai regulator dan administratif, mengambilalih keseluruhan rantai produksi hingga pemasaran. Peran investor asing hanya sebatas penyedia jasa bagi YPFB. Selain itu juga terjadi peningkatan tarif pajak dan royalty menjadi 82% dan investor asing diberikan batas waktu 180 hari untuk membuat kontrak baru dengan Pemerintah Bolivia.

Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana pengaruh kerja sama investasi energi Bolivia di masa depan pasca Evo Morales menetapkan kebijakan nasionalisasi. Apakah Bolivia akan ditinggalkan investor lama dan bagaimana perkiraan masuknya investor baru yang berinvestasi di industri migas Bolivia

mengingat migas sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara. Pertanyaan inilah yang akan penulis coba jawab dengan menggunakan tiga konsep diatas.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Penelitian ilmiah adalah suatu penyelidikan sistematis untuk mencari jawaban-jawaban atas sebuah persoalan. Persoalan ilmiah berawal dari adanya pertanyaan-pertanyaan ilmiah sehingga diperoleh formulasi menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif neoliberalisme sebagai jalan untuk mengganti kendali atas perekonomian di sektor publik (pemerintah) ke sektor swasta melalui konsep liberalisasi (*inward*) foreign direct investment (FDI). Konsep FDI ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan pengaruh kerjasama investasi energi di Bolivia pasca kebijakan nasionalisasi. Selain itu penulis juga menggunakan konsep kerjasama investasi energi untuk menjelaskan bentuk kegiatan usaha dan investasi di sektor hulu migas serta konsep nasionalisasi untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi diterapkannya kebijakan nasionalisasi di Bolivia.

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui; untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui; dan untuk memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh

metode kuantitatif<sup>41</sup>. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi, pandangan umum dan penggunaan yang memungkinkan dari teori yang mencari tau arti dari anggapan yang berasal dari individu dan kelompok terhadap suatu masalah sosial. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha memaparkan secara historis, sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan nasionalisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kerja sama investasi energi di Bolivia.

### **1.8.2 Unit dan Tingkat Analisa**

Dalam menentukan tingkat analisa, terlebih dahulu ditetapkan unit analisa. Unit analisa adalah obyek yang perilakunya akan di analisa<sup>42</sup>. Unit analisa dalam penelitian ini adalah negara yang fokus pada pembuatan keputusan tentang hubungan internasional yaitu Bolivia sebagai pembuat kebijakan nasionalisasi. Sedangkan tingkat analisisnya adalah sistem internasional dimana terdapat dinamika di dunia internasional yang cenderung menganut paham liberalisme sehingga mendorong Bolivia untuk memberlakukan nasionalisasi dan berpengaruh terhadap kerja sama investasi energi.

### **1.8.3 Batasan Penelitian**

Penelitian ini ruang lingkupnya dibatasi yaitu pada kebijakan nasionalisasi yang dikeluarkan oleh Evo Morales sejak pertama kali ia menjabat sebagai presiden pada tahun 2006 hingga tahun 2011. Tahun 2006 merupakan cikal bakal

---

<sup>41</sup> Strauss & Corbin, 1998. *Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, 20. Diakses dari [www.nova.edu/ssss/QR/WQR/corbin.pdf](http://www.nova.edu/ssss/QR/WQR/corbin.pdf) pada 1 Januari 2014 pukul 22.00 WIBL

<sup>42</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3S, 45.

lahirnya kebijakan pemerintah Bolivia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh pada kerja sama investasi asing terutama investasi di industri migas Bolivia.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, internet, makalah-makalah ilmiah, laporan-laporan resmi, dokumen dan jurnal yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.8.5 Teknik Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data pada awalnya penulis akan memilah-milah informasi yang di dapat berdasarkan urutan tempat, waktu dan ruang kejadian. Selanjutnya ditetapkan mana pembentuk kejadian dan dirangkai keseluruhannya sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh.

#### **1.8.6 Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan. Analisa data dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari data sekunder hingga akhirnya dapat dibuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh semua orang.